



Strategi Pemerintah Desa Karangagung dalam Mempertahankan Kemandirian Desa Pesisir

Triana Dianita Handayani^{1*}, Mangihut Siregar², Aji Agus Wijoyo³

¹⁻³Magister Ilmu Politik, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: [triana.dianita@uwks.ac.id](mailto: triana.dianita@uwks.ac.id)

Abstract. *The village government's strategy in maintaining Karangagung Village as an independent coastal village is a strategic issue in national development. Villages as a leading government unit have an important role in encouraging local economic growth, improving community welfare, and realizing sustainable development. This study uses a qualitative descriptive method to describe the optimal management of village potential by paying attention to economic, social, and environmental sustainability aspects. Karangagung Village has managed to show significant development with an increase in status based on the Building Village Index (IDM), from a developing village to a developed village in the 2018–2022 period, until it reached the status of an independent village. This success reflects the increasing capacity of the village government in managing resources, public services, and community empowerment. Village heads play a strategic role in formulating policies, mobilizing community participation, and empowering local potential, especially marine fisheries and salt ponds as strategic economic assets. Information technology innovations, such as the use of web-based applications for village budget management, have been proven to increase transparency, accountability, and governance efficiency. These findings confirm that sustainable natural resource management, community collaboration, and the use of information technology are the main factors in strengthening the independence of coastal villages.*

Keywords: *Innovation; Natural Resource Management; Strategy; Village Development; Village Independence.*

Abstrak. Strategi pemerintah desa dalam mempertahankan Desa Karangagung sebagai desa pesisir yang mandiri menjadi isu strategis dalam pembangunan nasional. Desa sebagai unit pemerintahan terdepan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mendeskripsikan pengelolaan potensi desa secara optimal dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan. Desa Karangagung berhasil menunjukkan perkembangan signifikan dengan peningkatan status berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), dari desa berkembang menjadi desa maju pada periode 2018–2022, hingga mencapai status desa mandiri. Keberhasilan tersebut mencerminkan peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola sumber daya, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Kepala desa berperan strategis dalam merumuskan kebijakan, menggerakkan partisipasi masyarakat, serta memberdayakan potensi lokal, khususnya hasil perikanan laut dan tambak garam sebagai aset ekonomi strategis. Inovasi teknologi informasi, seperti penggunaan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan anggaran desa, terbukti meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, kolaborasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor utama dalam memperkuat kemandirian desa pesisir.

Kata Kunci: Inovasi; Kemandirian Desa; Pembangunan Desa; Pengelolaan Sumber Daya Alam; Strategi.

1. PENDAHULUAN

Strategi pemerintah desa dalam mempertahankan Desa Karangagung sebagai desa pesisir yang mandiri, merupakan tantangan yang harus dilakukan secara tepat dan cermat. Banyak isu krusial dalam pembangunan di Indonesia, bahwa desa sebagai entitas pemerintahan terendah yang memiliki potensi signifikan dalam pengembangan ekonomi lokal. Desa Pesisir Karangagung, yang terletak di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, menjadi contoh konkret dari upaya memperthankan kemandirian desa yang dilakukan oleh kepala desa melalui berbagai strategi, mulai tahun 2015 sampai tahun 2018, dan berhasil meraih predikat sebagai desa

berkembang, yang kemudian meningkat menjadi desa maju pada periode 2018 hingga 2022, dan saat ini telah mencapai status desa mandiri (Menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi republik Indonesia, 2022). Fenomena kemandirian desa ini tidak terlepas dari kebijakan pemerintah yang mendorong desa untuk mengelola sumber daya yang ada secara mandiri. Indeks Desa Membangun (IDM) mengukur kemandirian desa berdasarkan indikator, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Maka strategi yang diterapkan oleh kepala desa untuk merancang kebijakan kemandirian desa dan dampak kebijakan terhadap kehidupan masyarakat desa di pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangagung, dengan subjek penelitian yang terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis tematik, di mana data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema yang relevan dengan kemandirian desa pesisir.

Indikator keberhasilan dalam merancang kebijakan mempertahankan kemandirian desa, dampak kebijakan terhadap kemandirian desa, tingkat partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan program kemandirian desa, efektivitas pelaksanaan program yang mendukung kemandirian desa, serta inovasi kepala desa dalam mempertahankan kemandirian desa diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai strategi kepala pemeritahan dalam mempertahankan kemandirian Desa Pesisir Karangagung.

Strategi kepala desa dalam perencanaan pembangunan desa fokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan sumber daya. Mampu mengembangkan kebijakan yang inklusif, memastikan bahwa semua elemen masyarakat, yaitu perempuan dan kelompok rentan mendapat hak proses pengambilan keputusan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses di mana masyarakat diberikan kemampuan dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Proses ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing. Melalui forum diskusi atau musyawarah desa, masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka, yang menjadi dasar bagi kebijakan pembangunan desa. Pemberdayaan tidak hanya meningkatkan rasa memiliki terhadap program-program desa, tetapi juga mendorong kolaborasi antarwarga, sehingga tercipta lingkungan yang saling mendukung dan memperkuat.

Kemandirian desa merupakan suatu kondisi di mana desa mampu mengelola sumber daya yang dimiliki dan mengembangkan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Menurut Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014, kemandirian desa adalah

kemampuan desa dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemandirian ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019).

Di Desa Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, kemandirian desa dapat dicapai melalui pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah, khususnya hasil laut yang diolah menjadi produk-produk unggulan desa dan tambak garam. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban, desa ini memiliki potensi yang besar dalam sektor perikanan dan pertanian garam, yang jika dikelola dengan baik, dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar (BPS Tuban, 2024).

Kepala desa berperan penting dalam merumuskan strategi yang tepat untuk meningkatkan kemandirian desa. Melalui kebijakan yang inklusif dan partisipatif, kepala desa dapat mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sumber daya yang ada dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan desa (Supriyadi. 2021). Kepala pemerintahan desa sebagai pemimpin di tingkat lokal memiliki tanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan desa. Strategi yang digunakan adalah dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Meningkatkan kapasitas masyarakat melalui pelatihan keterampilan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi pada kemandirian desa (Hidayat. 2020). Desa Pesisir Karangagung, kepala pemerintahannya dapat menginisiasi program pelatihan yang fokus pada pengelolaan hasil laut dan tambak garam. Pelatihan pengolahan hasil laut menjadi produk yang bernilai tambah, seperti ikan asin atau olahan ikan lainnya. Data Dinas Perikanan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa pengolahan hasil laut dapat meningkatkan nilai jual produk hingga 30% dibandingkan dengan penjualan dalam bentuk mentah (Dinas Perikanan Tuban, 2021).

Selain itu, kepala desa harus membangun kemitraan dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan lembaga non-pemerintah, untuk mendukung program pemberdayaan masyarakat. Kerjasama dapat menciptakan akses pasar yang lebih baik bagi produk lokal, serta meningkatkan investasi di desa, menunjukkan bahwa desa pesisir mempunyai jaringan kemitraan yang baik cenderung lebih cepat mencapai kemandirian ekonomi (Santosa.2022). Strategi dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan adalah kunci mencapai kemandirian desa. Desa Pesisir Karangagung, mempunyai potensi sumber daya alam yang

besar, seperti hasil laut dan tambak garam, harus dikelola dengan bijak agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar (Raharjo; 2021).

Kemandirian Desa Karangagung dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan. Yaitu: (1) optimalisasi pemanfaatan hasil laut menjadi produk-produk hasil olahan laut dan tambak garam. Data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa produksi garam di Kabupaten Tuban mencapai 200.000 ton per tahun, di mana Desa Karangagung menyumbang sekitar 15% dari total produksi tersebut (Dinas Kelautan dan Perikanan, 2023). Maka, pengembangan teknologi dalam proses produksi garam perlu diperhatikan agar kualitas dan kuantitas produk dapat meningkat, (2) diversifikasi produk. masyarakat dapat memproduksi berbagai produk olahan hasil laut, seperti ikan asin, terasi, dan produk makanan lainnya. Diversifikasi produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar (Rahardjo; 2022); (3) Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam. Penggunaan teknologi solar untuk pompa air dalam proses produksi garam dapat mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi produksi hingga 40% (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2020); (4) Pemasaran yang efektif. Kepala desa perlu mengembangkan strategi pemasaran yang inovatif untuk memperkenalkan produk desa ke pasar yang lebih luas. Penggunaan platform digital, seperti media sosial dan *e-commerce*, dapat menjadi solusi untuk memasarkan produk secara efektif.

Selain itu, penting bagi kepala desa untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga ekosistem laut dan tambak agar tetap produktif. Kampanye kesadaran lingkungan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti seminar atau pelatihan yang melibatkan masyarakat. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan ekonomi desa.

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kemandirian desa. Pemberdayaan dilakukan melalui pembentukan kelompok usaha bersama (KUB) untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi dan memperkuat jaringan sosial di desa dalam pada pengelolaan sumber daya alam (Setiawan.2022). Melalui KUB, masyarakat dapat saling berbagi pengetahuan dan pengalaman, serta mengakses sumber daya yang lebih besar. Kepala desa berperan dalam memfasilitasi pembentukan KUB dan memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan. Dengan adanya KUB, masyarakat dapat

lebih mandiri dalam mengelola usaha mereka dan meningkatkan pendapatan, melalui pemasaran hasil produksi desa dalam meningkatkan kemandirian desa. Kepala desa perlu merumuskan strategi pemasaran yang efektif untuk produk hasil laut dan tambak garam. Pendekatan yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mempromosikan produk lokal penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran dapat meningkatkan visibilitas produk dan menarik minat konsumen (Prabowo; 2022). Kepala desa Pesisir Karangagung dapat membantu masyarakat dalam membangun brand produk lokal yang unik dan menarik. Misalnya, menciptakan merek untuk produk garam yang dihasilkan dari tambak tradisional dengan menonjolkan kualitas dan keunikan produk tersebut. Data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Tuban menunjukkan bahwa produk yang memiliki brand yang kuat cenderung lebih laku di pasaran (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tuban, 2021). Kepala desa dapat menjajaki kerjasama dengan pasar lokal dan supermarket untuk menyediakan tempat bagi produk desa, yang dapat diakses oleh lebih banyak konsumen, dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan nelayan hingga 50% (Setiawan. 2023).

Kerjasama antar desa merupakan strategi penting dalam mempertahankan kemandirian desa dan dapat memperkuat jaringan sosial dan ekonomi pendapatan hingga 20% (Santoso; 2020). Kerjasama dengan desa-desa tetangga dan pihak ketiga untuk mengembangkan potensi desa dan potensi pariwisata lokal. Melalui pengembangan paket wisata yang melibatkan beberapa desa, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar. Sehingga pengembangan pariwisata mampu meningkatkan kunjungan wisatawan hingga 60% dalam satu tahun (Rizki, 2021).

Inovasi dan teknologi menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian desa. Pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program desa. Desa yang mengadopsi teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan publik mengalami peningkatan kepuasan masyarakat. Penerapan sistem informasi desa membantu kepala desa dalam mengelola data dan informasi secara baik. Penggunaan aplikasi berbasis web untuk pengelolaan anggaran desa, yang telah diterapkan mampu meningkatkan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana desa (Sukma, 2022). Inovasi teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kemandirian desa.

Meskipun terdapat banyak potensi dalam mempertahankan kemandirian desa, bahwa ada berbagai tantangan yang dihadapi. Terutama keterbatasan akses terhadap modal dan teknologi. Banyak masyarakat yang masih mengandalkan metode tradisional dalam pengelolaan tambak dan hasil laut, sehingga produktivitasnya belum optimal. Untuk mengatasi hal ini, kepala desa perlu

menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan akses permodalan bagi masyarakat.

Tantangan lainnya adalah perubahan iklim yang berdampak pada hasil pertanian dan perikanan. Perubahan pola cuaca dapat mengganggu produksi garam dan hasil laut. Maka perlu mengedukasi masyarakat tentang adaptasi perubahan iklim dan pengelolaan risiko, dengan penerapan teknologi yang lebih tahan terhadap perubahan cuaca dapat menjadi solusi.. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang kemandirian desa menjadi tantangan sebagai kepala pemerintahan desa. Oleh karena itu, perlu sosialisasi dan kampanye mengenai kemandirian desa yang dilakukan secara terus-menerus. Kepala desa dapat mengadakan forum atau pertemuan rutin untuk mendiskusikan isu-isu terkait kemandirian dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program-program yang ada.

Teori pemberdayaan masyarakat menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Rappaport (1981), pemberdayaan terjadi ketika individu atau kelompok diberikan kekuatan untuk mengontrol sumber daya dan membuat keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat meningkatkan efektivitas program pembangunan. Menurut Arnstein (1969), partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan adalah esensial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa yang rutin diselenggarakan, bukan sekadar formalitas, tetapi menjadi ajang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan berkontribusi dalam perencanaan program pembangunan desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggali informasi secara mendalam mengenai strategi kepala pemerintahan desa dalam mempertahankan kemandirian desa pesisir. Penelitian ini dilakukan di Desa Pesisir Karangagung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, yang dipilih karena prestasinya dalam mencapai status desa mandiri. Objek penelitian iadalah kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat Desa, bumdes. Informasi yang diperoleh diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi yang diterapkan. Teknik pengumpulan data meliputi: Wawancara Mendalam, Observasi dan Dokumentasi.

3. HASIL PENELITIAN

Strategi Kepala Pemerintahan Desa dalam Mempertahankan Kemandirian Desa Pesisir Karangagung

Kepala pemerintahan Desa pesisir Karangagung menerapkan berbagai strategi inovatif dan komprehensif untuk mempertahankan kemandirian desa. Dari pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas SDM, sampai tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu:

Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan UMKM Berbasis Potensi Lokal.

Strategi ini fokus pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang berbasis pada potensi lokal desa, yaitu perikanan dan produksi garam. Kepala desa menginisiasi program-program pelatihan keterampilan, pendampingan manajemen usaha, dan fasilitasi akses permodalan bagi pelaku UMKM, yaitu:

- a. Peningkatan Keterampilan dan Nilai Tambah Produk: Pelatihan keterampilan pengolahan hasil laut (ikan asin, terasi, kerupuk ikan, abon ikan, dll.) secara signifikan meningkatkan kualitas dan nilai jual produk lokal. Pelaku UMKM mampu menghasilkan produk yang lebih beragam, menarik, dan memenuhi standar kualitas yang lebih tinggi.
- b. Perluasan Jangkauan Pasar Melalui Pemasaran *Online*. Pendampingan pemasaran online melalui media sosial, *marketplace*, dan website desa memperluas jangkauan pasar produk UMKM desa. Pelaku UMKM mampu menjangkau konsumen di luar desa, bahkan di luar kabupaten dan provinsi.
- c. Penguatan Jaringan Sosial dan Ekonomi Melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB): Pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUB) memperkuat jaringan sosial dan ekonomi masyarakat. KUB menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk saling berbagi informasi, pengalaman, dan sumber daya. KUB juga memudahkan akses terhadap permodalan dan pelatihan dari pemerintah dan lembaga keuangan.

Tabel 1. Perkembangan Jumlah UMKM di Desa Karangagung (2019-2024).

No	Tahun	Jumlah UMKM
1.	2019	25
2.	2020	35
3.	2021	42
4.	2022	48
5.	2023	55

Sumber : Data Primer yang diolah Kembali. Kantor Desa Karangagung Palang, Tuban. Jawa Timur, 2025.

Perkembangan jumlah UMKM yang ada setiap tahunnya mengalami peningkatan. Karena masyarakat desa berupaya untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat bermanfaat dan menghasilkan pendapatan, tanpa harus keluar desa. Maka strategi yang dilakukan oleh kepala desa

berserta Bumdes memfasilitasi kegiatan warga agar dapat berkembang, berusaha dan maju. Bahkan kepala desa dan Bumdes memotivasi masyarakatnya dengan mendatangkan tenaga ahli yang sesuai dengan kapasitas desa.

Tabel 2. Jumlah Peningkatan Pendapatan UMKM.

No	Keterangan	Peningkatan Pendapatan (%)
1.	Rata-rata Seluruh UMKM	35%
2.	UMKM Sektor Perikanan	40%
3.	UMKM Sektor Pengolahan Garam	15%
Total		90%

Sumber : Data Primer yang diolah Kembali. Kantor Desa Karangagung Palang, Tuban. Jawa Timur, 2025.

Semakin banyak jumlah UMKM yang berkembang, maka semakin besar pula pendapatan UMKM. Sehingga memudahkan bagi desa untuk mengelola sumber alam dan sumber daya yang ada. Terutama sektor perikanan, sebagai hasil laut yang dapat memberikan ciri khas Desa Karangagung sebagai sentra Kuliner di Bidang Perikanan

Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan

Strategi ini berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, terutama potensi perikanan dan tambak garam. Kepala desa mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan kampanye kesadaran lingkungan, sebagai berikut:

- a. Penggunaan Energi Terbarukan untuk Mengurangi Biaya Operasional dan Dampak Lingkungan: Penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti penggunaan energi surya untuk pompa air tambak garam, secara signifikan mengurangi biaya operasional dan dampak lingkungan. Petani garam tidak perlu lagi membeli bahan bakar untuk menjalankan pompa air, sehingga mengurangi pengeluaran dan emisi gas rumah kaca.
- b. Diversifikasi Produk untuk Meningkatkan Pendapatan dan Menciptakan Lapangan Kerja Baru: Diversifikasi produk, selain garam juga produk olahan hasil laut (terasi, petis, kerupuk udang, dll.), meningkatkan pendapatan dan menciptakan lapangan kerja baru. Masyarakat tidak hanya bergantung pada produksi garam, tetapi juga memiliki sumber pendapatan lain dari pengolahan hasil laut.
- c. Peningkatan Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya Menjaga Ekosistem Laut dan Tambak: Kampanye kesadaran lingkungan melalui penyuluhan, pelatihan, dan kegiatan bersih-bersih pantai meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan tambak. Masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan dan kelestarian sumber daya alam.

Tabel 3. Pengurangan Biaya Operasional Tambak Garam Setelah Penggunaan Energi Surya (2024).

Keterangan	Biaya Operasional Sebelum (Rp)	Biaya Operasional Sesudah (Rp)	Pengurangan Biaya (%)
Rata-rata per Petani	5.000.000	3.000.000	40%

Sumber : Data Primer yang diolah Kembali. Kantor Desa Karangagung Palang, Tuban. Jawa Timur, 2025.

Hasil rata-rata petani tambak garam di Desa Karangagung setelah menggunakan energi surya dalam pengelolaan garamnya, maka akan menghemat biaya operasional petani garam, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan petani garam Desa Karangagung Kec, Palang Kabupaten Tuban Jawa Timur. Seperti tabel berikut ini.

Tabel 4. Peningkatan Pendapatan Petani Tambak Garam Setelah Penggunaan Energi Surya.

Keterangan	Pendapatan Sebelum (Rp)	Pendapatan Sesudah (Rp)	Peningkatan Pendapatan (%)
Rata-rata per Petani	10.000.000	12.500.000	25%

Sumber : Data Primer yang diolah Kembali. Kantor Desa Karangagung Palang, Tuban. Jawa Timur, 2025.

Tabel berikut menunjukkan peningkatan pendapatan petani garam sebesar 25% setelah diversifikasi produk. Artinya produk siap dilepas ke pasar. Termasuk dalam hal kebersihan dari sisa-sisa pengolahan/limbah yang ditimbulkan dalam aktivitas operasional produksi. Desa sudah menyediakan tempat pembuangan sampah yang mudah dijangkau oleh warga, tanpa harus membuat sampah ke laut lagi.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkelanjutan

Strategi ini berfokus pada peningkatan kapasitas SDM masyarakat, terutama pemuda dan perempuan, melalui program-program pelatihan keterampilan teknis, kepemimpinan, dan manajemen organisasi. Pelatihan keterampilan teknis (pengolahan hasil laut, perbaikan perahu, menjahit, dll.) meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat. Masyarakat memiliki keterampilan yang lebih baik dalam menghasilkan produk dan jasa yang berkualitas. Peningkatan Kapasitas Pengurus Lembaga Desa Melalui Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Organisasi, pada pengurus lembaga desa (BPD, LPMD, Karangtaruna, PKK). Peningkatan Minat Belajar dan Prestasi Siswa. Dukungan pendidikan bagi siswa berprestasi/kurang mampu (beasiswa, bantuan alat tulis, bimbingan belajar) meningkatkan minat belajar dan prestasi siswa. Siswa termotivasi untuk belajar lebih giat dan meraih prestasi yang lebih tinggi. Setiap tahun, masyarakat desa yang mengikuti kegiatan pelatihan keterampilan semakin meningkat. Ini menunjukkan antusiasme masyarakat yang ingin berbenah diri menjadi pribadi yang mandiri. Semua keterampilan ditampilkan, masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangkan minatnya sesuai dengan minat dan kemampuan dirinya. Dalam dunia pendidikan, masyarakat desa Karangagung yang mayoritas

sebagai nelayan, juga berusaha meningkatkan sumber dayanya dengan berusaha untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Jika dulu hanya tamat sekolah dasar paling tinggi, sekarang sudah ada kemajuan untuk melanjutkan pendidikan ke SMP meski dengan memotivasi terus kepala desa dan perangkat desa, agar masyarakatnya dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi sesuai dengan kemampuan dan keadaan di desa.



Gambar 1. Kepala Desa Karangagung memberikan Motivasi kepada Masyarakat desa tentang Pentingnya Pendidikan.

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) Berbasis Teknologi Informasi

Strategi ini berfokus pada mewujudkan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif melalui penerapan sistem informasi desa dan pelibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa, yaitu:

- a. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Melalui Sistem Informasi Desa: Penerapan sistem informasi desa (website desa, aplikasi pengelolaan keuangan desa) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Masyarakat dapat mengakses informasi tentang anggaran desa, program pembangunan, dan laporan keuangan desa secara *online*.
- b. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa (Musdes) Rutin: Musyawarah desa (Musdes) rutin melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan desa. Masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan mengawasi pelaksanaan program pembangunan desa.
- c. Penguatan Peran Lembaga Desa dalam Proses Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan Desa: Pelibatan lembaga desa (BPD, LPMD, dll.) dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan desa. Peningkatan jumlah kunjungan website desa dari 100 menjadi 400 sebanyak 2.870. Ini menunjukkan bahwa adanya ketertarikan desa lain atau wilayah

lain dengan kemajuan yang dicapai oleh Desa Pesisir Karangagung, dari pengunjung yang mendatangi website desa Pesisir Karangagung.. Dari survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Desa Karangagung:

Tabel 5. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Desa.

No	Tingkat Kepuasan	Persentase (%)
1.	Sangat Puas	15
2.	Puas	60
3.	Cukup Puas	10
	Kurang Puas	15

Sumber : Data Primer yang diolah Kembali. Kantor Desa Karangagung Palang, Tuban. Jawa Timur, 2025.

Tabel menunjukkan bahwa 30% masyarakat sangat puas dan 55% puas terhadap pelayanan desa. Kepala desa dan perangkatnya berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Dengan adanya website desa, masyarakat desa pesisir dan desa lain jadi tahu apa saja program pembangunan yang akan dilaksanakan di desa.

Kerjasama Antar Desa dan Kemitraan Strategis

Strategi ini berfokus menjalin kerjasama dengan desa-desa tetangga dan pihak (sektor swasta, lembaga non-pemerintah, perguruan tinggi) untuk mendukung program pembangunan desa.

- a. Peningkatan Kunjungan Wisatawan dan Pendapatan Desa Melalui Kerjasama Antar Desa dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Lokal: Kerjasama antar desa dalam pengembangan potensi pariwisata lokal (pantai, kuliner, kerajinan tangan) meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan desa. Desa-desa saling melengkapi dalam menawarkan daya tarik wisata yang beragam.
- b. Peningkatan Akses Pasar dan Investasi di Desa Melalui Kemitraan dengan Sektor Swasta: Kemitraan dengan sektor swasta (perusahaan pengolahan hasil laut, perusahaan energi terbarukan) menciptakan akses pasar yang lebih baik bagi produk lokal dan meningkatkan investasi di desa. Perusahaan swasta memberikan dukungan teknis, permodalan, dan pemasaran bagi pelaku UMKM.
- c. Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Program Pembangunan Desa Melalui Kemitraan dengan Lembaga Non-Pemerintah dan Perguruan Tinggi: Kemitraan dengan lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi memberikan dukungan teknis dan pendampingan dalam pelaksanaan program pembangunan desa. Lembaga non-pemerintah dan perguruan tinggi memiliki keahlian dan pengalaman yang dapat membantu desa dalam mengatasi berbagai masalah pembangunan.

Pembahasan

Strategi kepala pemerintahan Desa Pesisir Karangagung dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kemandirian desa baik secara individu maupun kelompok. Esensinya, partisipasi masyarakat dimulai dari proses perencanaan yang dilakukan dalam musyawarah desa hingga evaluasi pelaksanaan program yang bertujuan untuk mencapai kemandirian desa.

Keberhasilan Pemerintah Desa Karangagung dalam meningkatkan kemandirian desa tidak terlepas dari peran aktif masyarakat yang turut berkontribusi dalam proses pembangunan. Namun dalam pelaksanaan partisipasi ini, terdapat kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah desa. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan dalam pelayanan informasi yang masih dilakukan secara manual dan belum sepenuhnya terintegrasi dengan teknologi informasi, seperti website desa. Hal ini disebabkan oleh masalah teknis yang berulang kali dialami oleh pemerintah desa dalam pengelolaan website.

Partisipasi politik ini bukan hanya merupakan usaha dari pemerintah desa, tetapi juga melibatkan masyarakat secara bersama-sama untuk mencapai tujuan kemandirian desa. Oleh karena itu, pemerintah desa berhasil meraih nilai Indeks Desa Mandiri (IDM) yang tinggi, sehingga masuk dalam kategori Desa Mandiri dari tahun sebelumnya. Berdasarkan penelitian ini, terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang dapat diidentifikasi, yaitu:

Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di Desa Karangagung dilakukan melalui musyawarah desa. Dalam forum ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Setiap masukan dari masyarakat menjadi dasar bagi pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan desa.

Partisipasi dalam Pelaksanaan Kegiatan

Masyarakat berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa. Keterlibatan masyarakat dalam merealisasikan program-program pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur dan pengembangan UMKM, menunjukkan bahwa partisipasi ini sangat penting untuk keberhasilan program. Contohnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah berjalan dengan baik berkontribusi pada pendapatan desa.

Partisipasi dalam Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan

Masyarakat juga terlibat dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan cara langsung mengunjungi kantor desa atau melalui media sosial yang telah disediakan. Dengan adanya partisipasi ini, masyarakat dapat memberikan masukan dan kritik terhadap pelaksanaan program, sehingga pemerintah desa dapat melakukan perbaikan yang diperlukan.

Partisipasi dalam Pemanfaatan Hasil Pembangunan

Masyarakat Desa Karangagung berpartisipasi dalam memanfaatkan hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya infrastruktur yang dibangun, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, yang diharapkan dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi desa.

Partisipasi masyarakat yang telah dilaksanakan di Desa Karangagung menunjukkan bahwa partisipasi ini sangat berpengaruh terhadap setiap program atau rencana pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah desa. Dengan adanya partisipasi ini, seluruh program dapat berjalan dengan baik dan lancar, sehingga Indeks Pembangunan Desa (IPD) yang dinilai oleh pemerintah menunjukkan hasil yang memuaskan.

Partisipasi politik ini menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan modernisasi politik. Dalam konteks desa mandiri, modernisasi politik tidak dapat dipisahkan dari partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Menurut Lucian W. Pye, terdapat beberapa aspek penting dalam pembangunan politik yang relevan dengan penelitian ini:

a. Pembangunan Politik sebagai Prasyarat untuk Pembangunan Ekonomi

Bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, berfokus pada pemberdayaan ekonomi, meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun yang dimiliki.

b. Pembangunan Politik sebagai Kehidupan Politik Khas Masyarakat Industri

Menciptakan jenis kehidupan politik tertentu yang dapat ditiru oleh masyarakat lain. Pemerintah mencanangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dan industri kecil.

c. Pembangunan Politik sebagai Modernisasi Politik

Pembangunan politik yang baik dengan modernisasi politik, seperti; partisipasi politik, penghormatan terhadap hukum, dan keadilan. Kunci dalam mempertahankan desa mandiri.

d. Pembangunan Politik sebagai Operasi Negara Kebangsaan

Penciptaan lembaga-lembaga pemerintah Desa Pesisir Karangagung seperti BPD dan LPMD, yang berperan aktif dalam proses pembangunan.

e. Pembangunan Politik sebagai Pembangunan Administrasi dan Hukum

Melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan administrasi dan hukum melalui musyawarah desa. Memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat.

f. Pembangunan Politik sebagai Mobilisasi Massa dan Partisipasi

Melaksanakan mobilisasi massa untuk mendukung program-program pembangunan yang dicanangkan.

g. Pembangunan Politik sebagai Pembinaan Demokrasi

Pembangunan politik yang baik harus menciptakan lembaga-lembaga dan praktik-praktik demokrasi. Musyawarah desa yang dilaksanakan secara rutin menjadi salah satu wujud bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengajukan pendapatnya dalam proses pembangunan desa.

Mempertahankan Desa Mandiri di Desa Pesisir Karangagung memiliki kunci utama, yaitu partisipasi politik masyarakat dalam membangun kemandirian desa, antara lain:

a. Pembangunan Kapasitas Masyarakat dan Organisasi

Arah pembangunan Desa Karangagung menuju masyarakat yang kritis dan dinamis. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan pendidikan menjadi fokus utama.

b. Memperkuat Kapasitas Pemerintah dan Interaksi

Pembangunan ini bertujuan untuk memperlancar komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan dengan lancar.

c. Membangun Sistem Perencanaan dan Penganggaran Desa yang Responsif dan Partisipatif.

Desa Karangagung telah menyusun perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam pembahasannya, serta melaksanakan penganggaran secara transparan.

d. Membangun Kelembagaan Ekonomi Lokal yang Mandiri dan Produktif

Program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa mengarah pada pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seperti gambar berikut:



Gambar 2. Peresmian Kampung Pesisir Sebagai Pusat Oleh-Oleh, untuk menampung hasil panen dan usaha masyarakat desa Karangagung.

Adapun produk yang dipasarkan adalah hasil usaha masyarakat Desa Karangagung sendiri, ditata semenarik mungkin, rapi dan bersih serta ruangan yang sejuk membuat pengunjung merasa nyaman ketika sedang memilih oleh-oleh untuk dibeli. Partisipasi masyarakat dan strategi yang diterapkan oleh pemerintah Desa Karangagung menjadi faktor kunci dalam mempertahankan kemandirian desa.

4. KESIMPULAN

Strategi Kepala Desa Pesisir Karangagung untuk mempertahankan Desa Pesisir Karangagung sebagai desa mandiri, dengan menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat yang efektif, yaitu pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan aspek sosial dan lingkungan, yang secara keseluruhan berkontribusi pada peningkatan kemandirian desa. Partisipasi masyarakat yang aktif, dalam musyawarah desa, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan dan evaluasi program. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peran aktif dalam menentukan arah pembangunan desa, yang pada gilirannya meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hasil pembangunan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi, telah meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Strategi yang diterapkan oleh pemerintah desa telah memberikan dampak positif terhadap kemandirian desa. Indikator-indikator seperti peningkatan pendapatan masyarakat, akses terhadap layanan dasar, dan kualitas hidup secara keseluruhan menunjukkan kemajuan yang signifikan. Meskipun masih terdapat tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan dalam pelayanan informasi dan masalah teknis dalam pengelolaan website desa, menghambat partisipasi masyarakat dan akses terhadap informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pentingnya Kerjasama dan Kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan pihak ketiga (sektor swasta, lembaga non-pemerintah, dan perguruan tinggi) dalam mencapai tujuan pembangunan. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas desa dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2020). *Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Desa*. Jurnal Pembangunan Masyarakat, 5(2), 123-135.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tuban. (2022). *Statistik Desa Karangagung*

- Badan Pusat Statistik (BPS) Tuban. (2022). *Statistik Potensi Desa*.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Tuban. (2022). *Laporan Tahunan Pemberdayaan Masyarakat. Tuban: DPMD*.
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tuban. (2021). *Laporan Pasar dan Pemasaran*.
- Dinas Perikanan Tuban. (2021). *Laporan Tahunan Dinas Perikanan*.
- Hidayat, R. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan*. Jurnal Pembangunan Desa, 5(2), 45-58.
- Hidayati, N. (2020). *Pengelolaan Hutan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi*. Jurnal Lingkungan dan Pembangunan, 3(2), 100-115.
- Kementerian Dalam Negeri. (2022). *Pedoman Evaluasi Program Desa*.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. (2019). *Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014*.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2020). *Teknologi dalam Pengelolaan Tambak Garam*.
- Korten, D. C. (1987). *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach* Public Administration Review.
- Peraturan Bupati Tuban Nomor 29 Tahun 2017 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang *Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.
- Prabowo, M. (2022). *Strategi Pemasaran Produk Lokal*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 6(1), 15-28.
- Putri, R. (2021). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7(1), 45-60.
- Raharjo, S. (2021). *Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan*. Jurnal Lingkungan Hidup, 10(3), 30-42.
- Rahman, F. (2021). *Inovasi Teknologi dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Teknologi dan Masyarakat, 8(1), 56-70.
- Rizki, S. (2021). *Pengembangan Pariwisata Desa melalui Kerjasama Antar Desa*. Jurnal Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 10(1), 22-35.
- Santosa, A. (2022). *Kolaborasi dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Administrasi Publik, 8(1), 12-25.
- Santoso, B. (2020). *Kerjasama Antar Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa*. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Desa, 6(2), 34-50.
- Sari, R. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora.

- Setiawan, D. (2023). *Akses Pasar dan Pendapatan Petani*. Jurnal Ekonomi Pertanian, 9(1), 50-65.
- Sukma, T. (2022). *Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Administrasi Desa*. Jurnal Teknologi dan Administrasi, 9(1), 15-28.
- Supriyadi, A. (2020). *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Jurnal Pembangunan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Widianto, B. (2021). *Evaluasi Program Pembangunan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, 7(2), 20-35.
- Wijaya, A. (2019). *Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Kepala Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Desa*. Jurnal Sumber Daya Alam, 4(3), 78-92.